



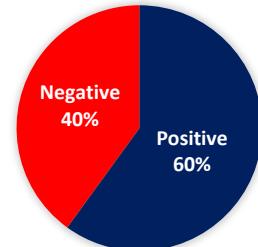
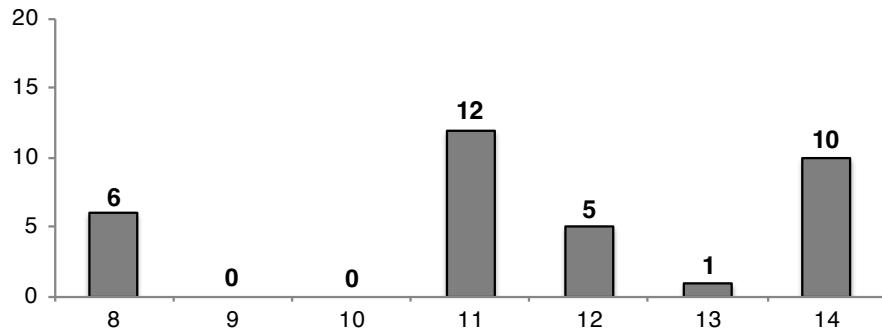
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(14 Agustus 2025)**

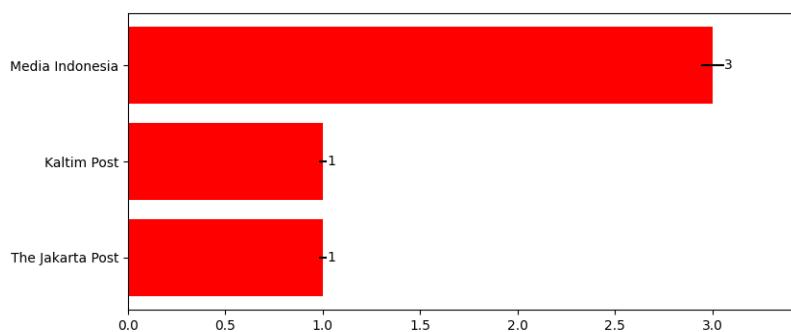
Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
5	10	6	0	4

Daily Statistic



Media Share



Influencers

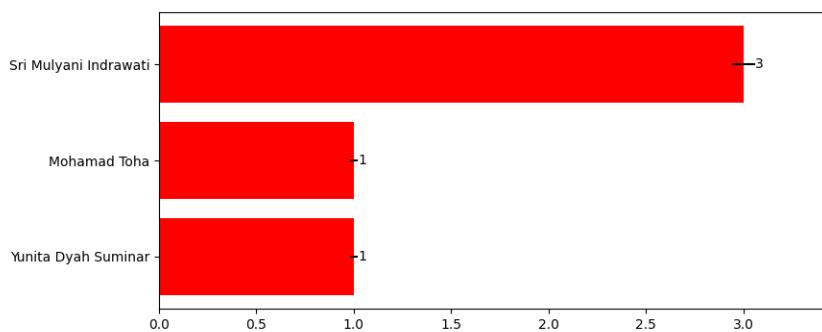


Table Of Contents : 14 Agustus 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	14 Agustus 2025	Kaltim Post	Tiga Kado Pahit Bupati Pati	1	Negative	
2	14 Agustus 2025	Suara Merdeka	DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Sudewo	1	Negative	
3	14 Agustus 2025	The Jakarta Post	Massive protest erupts in Pati demanding regent's resignation	1	Negative	
4	14 Agustus 2025	Media Indonesia	Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati	17	Negative	Mohamad Toha
5	14 Agustus 2025	Media Indonesia	Anggaran MBG Tembus Rp300 T Tahun Depan	9	Positive	Sri Mulyani Indrawati, Yunita Dyah Suminar
6	14 Agustus 2025	Media Indonesia	Tambah Investasi, Australia Lirik Jawa Tengah	9	Positive	
7	14 Agustus 2025	Suara Merdeka	Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium	7	Positive	
8	14 Agustus 2025	Suara Merdeka	Cek Kesehatan Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup	9	Positive	
9	14 Agustus 2025	Suara Merdeka	Blora Ajukan Izin 4.134 Sumur Minyak Tua ke Gubernur	15	Positive	
10	14 Agustus 2025	Jateng Pos	15 Ribu Siswa Ikut Speling	12	Positive	

Title	Tiga Kado Pahit Bupati Pati		
Media	Kaltim Post	Reporter	aau/jpe/ttg/jpg/dwi
Date	2025-08-14	Tone	Negative
Page	1	PR Value	



ANARKIS: Demonstran membakar mobil milik polisi saat demo di Alun-Alun Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), yang menuntut bupati mundur dari jabatannya.

TIGA KADO...

Sambungan dari hal 1

Dan, ketiga, dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bakal menggantikan Sudewo yang juga mantan anggota DPR itu, berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran corrupsi dari fee terikat dalam proyek pembangunan jalur kereta api ini sudah kami sampaikan saat memberikan update terkait penahanan salah satu tersangka kasus ini, yaitu saudara RS (Risna Sutriyanto, ASN Kemenhub)," ujar Juri Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/8), seperti dikutip

dati JawaPos.com. Menurut Sudewo bersikiruh menyatakan, tidak akan mundur. "Saya dipilih secara konstitusional, jadi tidak bisa berhenti hanya dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," kata politikus Partai Gerindra itu saat memberikan keterangan kepada media di pendopo kabupaten sekitar tiga jam setelah ia menemui demonstran di alun-alun.

Sebagaimana dilansir Radar Kudur Grup Jawa Pos, Sudewo mengaku bisa memahami emosi massa yang sempat memuncak. Menurutnya, dalam kerumunan besar, sulit mengendalikan situasi sepenuhnya. Bupati yang dilantik pada 20 Februari lalu itu juga menganggap peristiwa tersebut sebagai proses pembelajaran bagi dirinya yang baru menjabat beberapa bulan.

"Kita dampnya akan saya perbaiki. Masih banyak kelurusan yang harus dibenahi," katanya.

Menggesai desakan Sude-



Sudewo

wo mundur, Gubernur Jateng Ahmad Heryawan menyebut agar semua pihak menghormati situasi. "Ya, itu tanvaknya ke sana. Mekanismenya harus di DPRD," katanya seusai melakukan pantauan Cek Kesehatan Gratis di Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (13/8).

Tensi demonstrasi di Alun-Alun Pati yang dimulai sekitar puluk 08.15 meningkat menjelang siang. Sekitar pukul 09.37, Supriyono "Botol", salah satu pentolan aksi, nalk ke panggung dan menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan kontroversial Bupati Sudewo, terutama kenakan pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sekitar pukul 09.42, mulai terjadi pelemparan botol air mineral ke arah pendemo dari gerbang depan Kapolda Pati Kompolpati Jaka Wahyudi bersama Dandim Letkol Timotius Berlian Yogi Ananto kemudian menemui massa di pagung terbuka, mengajak me-

Tiga Kado Pahit Bupati Pati

Dilempari Demonstran, DPRD Bentuk Pansus Hak Angket, dan Bakal Diperiksa KPK

PATI — Setidaknya tiga kado pahit diterima Bupati Pati Sudewo sepanjang hari kemarin (13/8). Dua dari Pati, satu dari Jakarta.

Pertama, kala menemui sebentar puluhan ribu demonstran di Alun-Alun Pati, Jawa Tengah (Jateng), yang menuntutnya mundur, ia dilempari sandal dan botol air mineral. Kedua, lewat rapat yang berlangsung tegang karena demonstran sempat memaksa masuk, DPRD Pati memutuskan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Sudewo.

Baca TIGA KADO... Hal 7 ■

mencuci massa menggema. Upaya tersebut berhasil sempat dilakukan dengan shalawatan, namun segera disusul tembakan.

Situs Kian panas. Pukul 10.50, massa di sebelah timur pendapa, tepatnya di depan kantor DPRD, melempar botol dan batu. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata. Kantor DPRD Pati sempat dimasuki sejumlah massa aksi. Massa berhasil dipukul mundur sekitar 200 meter dari kantor bupati.

Sekitar pukul 12.15, Sudewo keluar menemui massa dengan kendaraan taktis Brimob. Namun, ketatannya disambut lemparan botol. Dalam pidato singkat, ia meminta maaf dan berjanji memperbaiki kesalahan. Sebelumnya, Kapolda Pati telah meminta jaminan dari peserta aksi bahwa situasi akan kondusif jika bupati hadir.

Hingga pukul 15.00, sebagian massa mulai meninggalkan lokasi, namun masih banyak masyarakat yang mongkrong sambil menonton. Ada sejumlah milik Polri yang digulung dan dibakar massa.

Kabidhumas Polres Jawa Tengah Kompolpati Artanto yang berada di lokasi menyebut, ada 11 orang yang diamanan, dilitasi, dan diperiksa. "Terkait korban, ada dari Polri dan masyarakat. Ada 34 orang saat ini (kemarin) sedang ditangani di RSUD RAA Soewondo, ada juga yang dipulangkan. Dari keseluruhan korban, tujuh anggota Polri, sisanya masyarakat," katanya.

Artanto menambahkan, para korban rata-rata mengalami luka lebam dan robek kulit. "Terkait korban jiwa, hasil penelusuran nihil," katanya.

Selain itu, korban yang dirawat di RSUD Soewondo rata-rata terdampak tembakan gas air mata yang membebaskan massa. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga menyebutkan tidak ada korban jiwa. Untuk korban luka, masih dilakukan pendaftaran lebih lanjut. (auu/jpe/ttg/jpg/dwi)

Title	DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Sudewo		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H49,ekd,enn-34
Date	2025-08-14	Tone	Negative
Page	1	PR Value	

DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Sudewo



SMNoor Elendi
WATER CANON: Polisi menembakkan water canon untuk membubarkan aksi ribuan massa pengunjung rasa yang menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur, Rabu, (13/8). Unjuk rasa berakhir ricuh karena massa kecewa, Bupati Sudewo tidak mau mundur. Sejumlah polisi melindungi Bupati Pati, Sudewo dari lemparan gelas air mineral dan sandal ketika menemui ribuan massa demonstran di atas mobil taktis Baracuda.(70)

DPRD...

(Sambungan hlm 1)

Kita tunggu hak angketsnya, dan sudah dibentuk Pansus," paparnya. Lebih lanjut dia mengakui, rakyat memerlukan kepada DPRD untuk proses selanjutnya. Rakyat, kata Gulo, akan mengawal.

"Kita tidak tunggu dua bulan, kita dorong agar lebih cepat lebih baik. Kita minta paling lama sepekan karena datanya sudah ada semua, data-data pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pak Bupati itu sudah ada," urainya.

Di lantas mengungkapkan sebagai data dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Bupati Sudewo. Di antaranya, kebijakan mutasi pejabat yang sekaligus menurunkan level ASN yang bersangkutan dari eselon II menjadi staf. Menurutnya, kebijakan tersebut murni pelanggaran hukum.

Selain itu, Gulo menyampaikan fakta lain, yakni berkait pengangkatan direktur RSUD Raja Soewondo Pati yang merupakan pensiunan PNS. Dia menyebut kebijakan itu juga melanggar aturan.

"Jadi, menurut saya teman-teman dewan tidak perlu terlalu berlama-lama (menyelesaikan hak angket). Karena faktanya bahannya sudah ada semua," tandas dia.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku sudah memperingatkan Bupati Pati

Sudewo untuk menerima aspirasi warga. Hal itu dinyatakan menanggapi aksi warga Pati, Rabu (13/8).

"Sudah saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasi," ujarnya di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (13/8).

Ia menyatakan tidak melarang demo. Gubernur mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka tetapi jangan sampai mengganggu keteribatan.

"Prinsip, silakan demo, tapi jangan sampai mengganggu keteribatan umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat, pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui," tegaskan.

Ia menandakan aparat kepolisian sudah mengamankan aksi demo masyarakat.

Sementara itu Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak akan melepasan jabatannya sesuai dengan tuntutan massa dalam demonstrasi yang digelar, Rabu (13/8).

Sudewo menolak mundur dengan alasannya dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

Demo besar yang melibatkan ribuan warga Pati kemarin mengusung tuntutan Sudewo mundur dari jabatannya. Tuntutan muncul setelah Sudewo menaikkan pajak

bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga yang memprotes kebijakan itu untuk menggelar demo.

Kebijakan itu kemudian diaulir, ia juga telah minta maaf atas pemayatasnya. Namun, warga tetap menuntut Sudewo mundur dalam demo kemarin yang diwarnai keriuhan.

Tuntutan massa aksi mendapat dukungan dari DPRD+Kabupaten Pati. DPRD sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Dukungan DPRD Kabupaten Pati setelah massa aksi berhasil mendukung gedung dewan.

+Sudewo menyatakan dirinya menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.

"Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut," ujarnya.

Menurutnya demo menjadi pembelajaran bagi dirinya. Dia berjanji akan lebih baik lagi dan berharap agar warga Pati menjaga soliditas.

"Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakkan jangan sampai terprovokasi siapa pun. Jadi Pati ini adalah milik semua, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Ya warga Pati, saya harap ini jadi pembelajaran bagi warga Pati dan untuk saya," lanjutnya.(H49,ekd,cnn-34).

Bupati Menolak Mundur

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi mengajukan hak angket untuk penyelidikan kebijakan bupati, Rabu (13/8). Langkah itu diambil setelah perwakilan warga yang berunjuk rasa mendesak wakil rakyat untuk melakukan pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Penggunaan hak angket diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Pati yang dihadiri 42 dari 50 anggota dewan. Mereka berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPRD, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat. Termasuk anggota dewan dari Partai Nasdem yang fraksinya tergabung dengan Fraksi PDIP.

Dalam kesempatan itu, rapat paripurna menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang beranggotakan 15 orang yang mewakili semua fraksi.

Pansus dipimpin oleh Teguh Bandung Waluyo dari Fraksi PDIP dengan Wakil Ketua Joni Kumianto (Fraksi Partai Demokrat), dan Sekretaris Muntamah (Fraksi PKB). "Harapannya Pansus Hak Angket segera bekerja," ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang memimpin Rapat Paripurna.

60 Hari

Lebih lanjut dia menjelaskan, pansus memiliki waktu 60 hari untuk berkeja melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan regulasi atau kebijakan bupati sebagai representasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas.

"Kami memberi waktu (Pansus) bekerja paling lambat 60 hari. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari (selesai) untuk mengambil kesimpulan. Kemudian hasil hak angket dikirim ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung kembali kepada kita DPRD Pati dan keputusannya seperti apa," jelasnya.

Bergulirnya hak angket disambut positif masyarakat. Kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Nimerodi Gulo mengatakan, DPRD mau mendengar dan merespons aspirasi rakyat.

"Mereka (anggota DPRD) sudah paham satu persatu apa yang menjadi persoalan, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Pak Bupati.

(Bersambung hlm 5 kol 1)

Title	Massive protest erupts in Pati demanding regent's resignation		
Media	The Jakarta Post	Reporter	nal
Date	2025-08-14	Tone	Negative
Page	1	PR Value	



The people have spoken: Grassroots groups stage a rally on Wednesday outside Pati Regent Sudewo's office in Central Java. Protestors breached the local legislative building, leading to an emergency session.

Massive protest erupts in Pati demanding regent's resignation

Suherdjoko

The Jakarta Post/Pati, Central Java

Tens of thousands of residents from the streets of Pati in Central Java on Wednesday, calling for the immediate resignation of Regent Sudewo amid a wave of controversy sparked by his widely criticized policies that have captured national headlines.

Protesters began gathering before dawn in front of the Pati Regional Administration Office on Jl. Tombronegoro, with many arriving on trucks from various regions in Pati.

They were carrying banners with messages such as "Take down the arrogant regent" and "Step down, Sudewo, or the people will remove you by force".

Around 11 a.m., the protest grew tense as demonstrators threw empty water bottles at the Pati Regional Administration Office and tried to breach

the fence. Police deployed tear gas to control the crowd, resulting in clashes between protesters and officers. A video also circulated showing the local police chief being struck during the confrontation.

Around noon, Regent Sudewo appeared atop a armored tactical vehicle in an attempt to calm the unrest, offering an apology and pledging to "do better".

But the crowd's frustration boiled over as they hurled sandals, rotten tomatoes and boiled water at him. His adjutants quickly shielded him with police riot shields before he withdrew swiftly back into the Pati Regional Administration Office.

The chaos persisted, with protesters throwing rocks at the building's windows, setting a police vehicle ablaze and severing the office's Wi-Fi cables.

*Continued on page 11
Commentary page 2*

Massive protest erupts in Pati demanding regent's resignation

Continued from page 1

By 1 p.m., protesters had breached the Pati Legislative Council building, prompting local councilors to convene an emergency session. The council agreed to exercise its right of inquiry to investigate Regent Sudewo's policies and formed a special task force to investigate potential misconduct as a basis for impeachment.

The move was unanimously supported by all eight political parties represented in the council, including Sudewo's own Gerindra Party, which holds 12 percent of the seats.

Authorities finally managed to disperse the crowd by around 3 p.m., after hours of unrest.

At least 40 people were injured and required hospital treatment, including seven police officers and one journalist. A local councilor claimed that two people were killed during the protest, though the report has not yet been verified.

After the protest, Sudewo said he "respected" Pati Legislative Council's decision but firmly stated that he would not step down from his position.

"I can't simply resign from my post. I was elected through a democratic process in accordance with the constitution. There is a proper mechanism we must follow for matters like this," Sudewo said on Wednesday, as quoted by Antaranews.

To impeach a regent or mayor, at least two-thirds of the regional council members must approve the motion in a plenary session. If the motion passes, the council then submits the impeachment request to the President through the Home Ministry.

The case is then reviewed by the Supreme Court, which conducts a substantive judicial review of the charges. If the court upholds the impeachment, the Home Ministry is legally required to dismiss the regional head within 30 days of the court's ruling.

Controversial tax hike

The massive protest against Sudewo was triggered by his decision to increase land and building tax rates by up to 250 percent in certain areas in the regency only two months into his term.

He justified the move by noting that the regency's property tax rate had not been revised since 2011, despite regulations requiring local governments to adjust rates at least once every three years.

He also pointed out that land and building tax revenue in Pati amounted to just Rp 36 billion annually, significantly lower than in neighboring, smaller regencies. For comparison, Rembang and Kudus each collect around Rp 50 billion in property taxes per year.

The tax hike policy received widespread protest from residents once it was made public in June, with many residents acting out of concern for implementing such a steep increase amid a nationwide economic slowdown.

The following month, Sudewo sparked another controversy with a public statement regarding a planned protest against the tax hike, which was reportedly set to draw around 5,000 participants.

"Go ahead and protest, whether it's 5,000 or even 50,000 people, I won't be afraid," he said.

"I will move forward with the tax increase and won't back down, not even a single step."

These remarks sparked further backlash, with many interpreting them as a direct challenge to the people of Pati.

On Aug. 1, a group of Pati residents launched a donation campaign to support the planned protest.

The donation campaign received widespread support from Pati residents. Within days, locals donated thousands of boxes of bottled water, snacks, bananas and other food items, which were stacked in front of the Pati Regional Administration Office to aid the protesters.

The story quickly made national headlines, prompting Central Java Governor Ahmad Lutfi, Home Minister Tito Karnavian and even President Prabowo Subianto, who also leads the Gerindra Party, to urge Sudewo to reconsider the policy.

Under mounting pressure, Sudewo eventually scrapped the tax hike on Aug. 8 and issued a public apology.

Despite this concession, residents vowed to proceed with the planned protest, demanding his resignation and citing other controversial policies as evidence of his inability to lead Pati.

These controversies include his decision to reduce the school week from six to five days, the abrupt dismissal of hundreds of local hospital employees without severance pay and a proposed renovation of a mosque that many residents view as an unnecessary spending, since the mosque had already undergone major repairs just a few years earlier. (nal)

Title	Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati		
Media	Media Indonesia	Reporter	Fah/Bob/HT/Faj/Mir/X-4
Date	2025-08-14	Tone	Negative
Page	17	PR Value	

Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

- Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
- Masyarakat mengaku telanjur kecewa terhadap bupati.
- DPRD Pati sepakat membentuk pansus angket.
- Bupati Sudewo berkukuh menolak mengundurkan diri.

AKHMAD SAFUAN
achmad.safuan@medaindonesia.com

PEMERINTAH pusat diminta turun tangan menangani persoalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, agar berjalan cepat, adil, dan tidak meningkatkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Ketegangan antara Bupati Pati Sudewo dan masyarakat tidak boleh dibarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati," kata anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan jalur komu-

nikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan warga akan menjadi kunci meredakan tensi serta mengembalikan stabilitas di daerah.

Menyeri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah memonitor perkembangan di Pati. Dia juga meminta masyarakat dan aparat keamanan untuk menahan diri. Prasetyo mengaku terus berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk mencari jalan keluar.

TELANJUR KECEWA

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto, mengatakan unjuk rasa digelar karena masyarakat telanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo, seperti menaikkan

PBB-P2 sebesar 250%, kebijakan 5 hari sekolah, regrouping sekolah yang berdampak pada banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan karyawan honorer RSUD Soewondo dengan dalih efisiensi.

Namun, lanjut Teguh, di sisi lain anggaran bidang pembangunan justru meningkat, seperti rencana pembongkaran Masjid Agung Pati yang baru direnovasi, pembangunan alun-alun yang juga baru seleksi direnovasi, dan pengadaan videotron.

Unjuk rasa warga Pati di alun-alun kabupaten sempat memanas. Aksi saling dorong dan kejar antara aparat keamanan dan massa sempat berlangsung, serta terjadi pembakaran kendaraan milik aparat kepolisian.

MENOLAK MUNDUR
Sudewo berkukuh menolak mengundurkan diri sebagai Bupati

Pati Pati karena merasa jabatan yang diembannya merupakan pilihan rakyat sesuai konstitusi. "Saya tidak akan mundur, saya dipilih rakyat secara konstitusional. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," tandanya.

Dia menyampaikan kondisi Pati sudah kembali kondusif. "Secara garis besar sudah selesai," ujar Sudewo.

ALIRAN FEE

Sementara itu, juri bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Praseyo mengatakan Bupati Pati Sudewo (SDW) termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Ya, benar. SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta," ujar Budi.

Sebelumnya, Sudewo membantah menerima uang sebesar Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat. (Fah/Bob/HT/Faj/Mir/X-4)

Title	Anggaran MBG Tembus Rp300 T Tahun Depan		
Media	Media Indonesia	Reporter	HT/AT/Ant/E-1
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Anggaran MBG Tembus Rp300 T Tahun Depan

- Anggaran MBG naik dari Rp71 triliun menjadi Rp300 triliun karena ada penambahan jumlah penerima.
- Banyaknya aktor ekonomi yang terlibat membuat program MBG diyakini akan mendongkrak pertumbuhan.
- Ratusan siswa di Sragen dan Klaten mengalami keracunan seusai mengonsumsi MBG.

IHFIA FIRDAUSYA
ihfa@mediaindonesia.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 bakal mencapai Rp300 triliun, meningkat lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran di tahun ini yang sebesar Rp71 triliun. "MBG tahun ini Rp71 triliun kita cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta penerima akan mendapatkan MBG, itu lebih dari Rp300 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Di memastikan dana tersebut akan tersedia dalam APBN 2026.

Sebelumnya, kabar mengenai anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp300 triliun disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2025. Menurut dia, anggaran MBG

“Penerima program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta, yang dilayani oleh 32 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi.

yang dialokasikan sebesar Rp171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa. Luhut yakin MBG bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat program itu melibatkan banyak aktor ekonomi sehingga perputaran ekonomi bisa ditingkatkan. Karena itu, ia mendorong program itu terus diperluas cakupan penerimanya, termasuk anggarannya.

TAMBAH JUMLAH PENERIMA

Untuk tahun ini, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun di APBN 2025 dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima, terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta, yang dilayani oleh 32 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum. Untuk kebutuhan itu, pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp100 triliun sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

PUTAR PEREKONOMIAN

Di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, perekonomian Indonesia bisa

rintahkan penghentian sementara pemberian MBG di Kabupaten Sragen. Keputusan itu diambil setelah seratusan siswa mengalami keracunan seusai mengonsumsi MBG. "Peristiwa keracunan MBG di Kabupaten Sragen masih dalam pemeriksaan dan evaluasi bersama. Karena itu, untuk sementara MBG serta batita."

ia menambahkan, saat ini sampel makanan di dapur umum lokasi MBG daerah tersebut sedang diperiksa laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab pastinya. "Kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam. Sampai hari ini, tidak ada yang dirawat inap, hanya rawat jalan. Hasilnya kita lab-kan. Tetapi kondisi anak-anak kita sudah sehat semua," lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar menambahkan, 196 anak mengalami gangguan pencernaan ringan seusai menyantap MBG.

Siswa keracunan setelah mengonsumsi MBG juga terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dedi Aprianto menyebutkan, 90 siswa dibawa ke Puskesmas Mlati 2 dan tujuh siswa dibawa ke RSUD Sleman. Gejala yang dialami ialah muntah, pusing, diare, dan sakit perut. (HT/AT/Ant/E-1)

DIHENTIKAN SEMERINTAH

Sementara itu, di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi meme-

Title	Tambah Investasi, Australia Lirik Jawa Tengah		
Media	Media Indonesia	Reporter	HT/E-1
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Tambah Investasi, Australia Lirik Jawa Tengah

PEMERINTAH Australia akan mendorong pengusaha di ‘Negeri Kanguru’ untuk menanamkan investasinya di Jawa Tengah, mengingat banyaknya kawasan industri yang tersedia di provinsi itu.

“Harapan saya investasi dari Australia di Jawa Tengah bisa masuk 10 besar. Sampai sekarang, investasi dari Australia ada mungkin kurang dari optimal,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Rob Brazier, saat bertemu Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, kemarin.

Hingga kini, lanjut Rob, pengusaha asal Australia lebih banyak yang berinvestasi di Batam karena adanya kawasan ekonomi khusus di sana. Dengan terus bertambahnya jumlah kawasan industri di Jawa Tengah, ia mendorong pengusaha Australia untuk mulai melirik Jawa Tengah.

Rob menambahkan, dalam waktu dekat, ada rombongan investor dari negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia. Ia telah mengusulkan agar rombongan investor tersebut turut mengunjungi Jawa Tengah untuk melihat kawasan-kawasan industriya.

“Kalau investor dari Australia melihat kawasan industri di sini, mudah-mudahan mereka tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, investasi dari Australia di Jawa Tengah saat ini masih berada di peringkat 20. Ia mengapresiasi keinginan Dubes Australia yang ingin meningkatkan investasinya agar masuk 10 besar di Jawa Tengah.

“Beliau (Dubes Australia) sangat tertarik dan jatuh cinta sama Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Dalam lima tahun terakhir, investasi tertinggi dari Australia di Jawa Tengah terjadi pada semester I 2025, yakni Rp24,584 miliar. Sektor investasinya antara lain perdagangan dan reparasi, pertambangan, serta industri karet dan plastik.

“Hari ini kita lakukan penjajakan kerja sama, di antaranya adalah perdagangan, pariwisata, dan investasi. Beliau sangat berharap sekali investasi untuk ke sini,” kata Luthfi.

Sejauh ini, produk Jateng yang di ekspor ke Australia pada 2025 antara lain pakaian dan aksesoris pakaian, perabotan, alas kaki dan pelindung kaki, kayu dan barang dari kayu, garam, belerang, tanah, mutiara alam, barang dari kulit, ikan, moluska, dan hewan invertebrata lainnya. (HT/E-1)

Title	Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-23
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	7	PR Value	

Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium

■ Kasus Keracunan MBG di Sragen

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sragen masih dalam pemeriksaan dan evaluasi bersama.

Saat ini, contoh makanan di dapur umum lokasi MBG daerah tersebut, sedang diperiksa di laboratorium milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab pastinya.

"Kita berhentikan dulu MBG-nya. Kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam. Sampai hari ini tidak ada yang dirawat inap, ia hanya rawat jalan. Hasilnya kita labkan. Kondisi anak-anak sudah sehat semua," kata Ahmad Luthfi saat ditemui di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu, (13/8).

Sembari menunggu hasil laboratorium, Satgas MBG

yang rawat inap, karena gangguan pencernaan ringan. Tetapi untuk penyebabnya memang belum diketahui. Sampel makanannya sekarang diperiksa di provinsi untuk melihat apa penyebabnya," katanya.

Yunita menyatakan, Gubernur Ahmad Luthfi juga terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pemprov Jateng juga sudah membuka posko layanan kesehatan selama 24 jam, untuk menerima aduan atau laporan lanjutan terkait peristiwa tersebut, terutama perkembangan anak-anak yang menjadi korban.

Gangguan Pencernaan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menambahkan MBG di Sragen mengakibatkan sekitar 196 anak keracunan. Ratusan anak tersebut sudah diperiksa dan mengalami gangguan pencernaan ringan.

"Rawat jalan, tidak ada

yang rawat inap, karena gangguan pencernaan ringan. Tetapi untuk penyebabnya memang belum diketahui. Sampel makanannya sekarang diperiksa di provinsi untuk melihat apa penyebabnya," katanya.

Yunita menyatakan, Gubernur Ahmad Luthfi juga terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pemprov Jateng juga sudah membuka posko layanan kesehatan selama 24 jam, untuk menerima aduan atau laporan lanjutan terkait peristiwa tersebut, terutama perkembangan anak-anak yang menjadi korban.

Dalam dua hari ini, pemeriksaan secara komprehensif akan dilakukan. Baik dari alat makan, dapur, bahan makanan, bahkan cara pengolahan sampai penyajian. Pihak SPPG juga akan dievaluasi oleh BGN selaku instansi yang berwenang terkait program MBG. (ekd-23)

Title	Cek Kesehatan Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H41-60
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Cek Kesehatan Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup

SEMARANG- Pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG) yang merupakan program negara, kali ini menyasar ribuan mahasiswa baru Undip, di Muladi Dome Tembalang.

Program ini didukung keberadaan program Layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) 2025 yang akan segera memberikan penanganan lanjut apabila dalam cek kesehatan ditemukan tanda-tanda penyakit.

Gubernur Jateng Ahmad Lutfi secara langsung meninjau kegiatan ini termasuk menyapa mahasiswa, Rabu (13/8). "Mahasiswa harus hidup sehat, penuh semangat," tuturnya sembari menyalamai mahasiswa.

Berada di antara ratusan sivitas akademika yang antre di Lantai I Gedung Muladi, gubernur didampingi

gi Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar, Rektor Undip Prof Dr Suharmomo dan Wakil Rektor Undip Wijayanto PhD. Dia juga berkeliling menyapa para dokter, dan paramedis yang tergabung dalam 20 tim untuk melayani pemeriksaan kesehatan mahasiswa.

Dedikasi

Tenaga kesehatan yang diturunkan di Kampus Undip berasal dari berbagai rumah sakit di Jateng. Mereka dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi memberikan layanan kesehatan kepada kaum muda. "Melalui cek kesehatan gratis ini juga, pemprov berupaya mendukung program pemerintah pusat," ujarnya.

Program ini diperkuat kehadiran para dokter spesialis penyakit, yang

akan bergerak secara berkeliling memantau kesehatan masyarakat, termasuk di lingkungan kampus.

Metode ini menyasar masyarakat kawasan pedesaan dengan telah melibatkan 5.96 juta warga termasuk membidik 15.000 mahasiswa baru Undip.

Rektor Undip Prof Dr Suharmomo menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Pemprov Jateng. Mahasiswa berkesempatan mengikuti program CKG, sebagai upaya mewujudkan generasi muda bangsa yang sehat dan berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dyah Suminar menuturkan, pemprov telah meluncurkan program Layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) 2025 bagi masyarakat Jateng. Dengan adanya program ter-

sebut, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dengan datang langsung ke balai desa.

Diberikan lima layanan kesehatan gratis untuk penyakit tuberkulosis (TBC), kanker serviks, kesehatan jiwa, kusta, dan pemeriksaan kehamilan. Terdapat keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan program ini.

Misal, jarak ke balai desa dari tempat tinggal yang lebih dekat daripada harus ke puskesmas atau rumah sakit, tentu membuat masyarakat lebih hemat waktu. Selain itu, warga hanya perlu membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. "Pada pemeriksaan kesehatan secara umum di masyarakat masih ditemui adanya penyakit gula, darah tinggi juga gigi," katanya.(H41-60)

Title	Blora Ajukan Izin 4.134 Sumur Minyak Tua ke Gubernur		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H18-53
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	15	PR Value	

Blora Ajukan Izin 4.134 Titik Sumur Minyak Tua ke Gubernur

BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora gerak cepat menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Caranya, dengan mengajukan izin pengelolaan sebanyak 4.134 sumur minyak tua kepada Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Puji Arianto mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi awal titik-titik sumur yang akan diajukan izin ke Gubernur Jawa Tengah. Total terdapat 4.134 titik sumur di 37 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang masuk rekomendasi pengajuan untuk dapat dikelola.

Setelah diajukan, nantinya akan dibentuk tim gabungan dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan aparat penegak hukum untuk verifikasi lapangan. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pemberian izin pengelola-

an, ujar Puji Ariyanto, Rabu (13/8).

Dia mengungkapkan, Pemkab Blora telah menggelar rapat untuk memfasilitasi dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga terkait pengelolaan sumur minyak tua yang tersebar di berbagai desa di wilayah Kabupaten Blora.

Rapat dipimpin Bupati Arief Rohman di ruang pertemuan Kantor Pemkab, Selasa (12/8). **Tiga Unsur**

Menurut rencana, Pemkab akan membuka pengelolaan sumur masyarakat melalui tiga unsur pengelola. Yakni PT Blora Patra Energi (BUMD), Koperasi Blora Migas Energi (Koperasi), dan CV Mataram Connection (UMKM). Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa inisiatif tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Kalau dari 4.000-an sumur yang kita ajukan, separuhnya disetujui, dan setiap sumur diketahui 10 orang, berarti akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Ini tentu menjadi peluang besar bagi warga kita, tandas Bupati Arief Rohman.

Terkait isu lingkungan, Bupati Arief memastikan bahwa aspek kelestarian akan menjadi perhatian serius. Menurutnya, tim gabungan

nanti juga akan melibatkan unsur lingkungan hidup untuk menilai dampak pengelolaan sumur terhadap lingkungan.

Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu mengajak seluruh unsur mulai dari Forkopimda, BUMD, Koperasi, UMKM, hingga pemerintah kecamatan dan desa untuk memperkuat koordinasi demi menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Kami minta jajaran TNI/Polri, Danramil, Kapolsek, dan Kepala

Desa mengawali proses ini. Semua pihak harus saling berkoordinasi, nanti kepala desa dengan pengelola dalam rangka untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman, katanya.

Bupati berharap, dengan sinergi semua pihak, pengelolaan sumur masyarakat tidak hanya mendukung peningkatan produksi migas, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, berpihak pada masyarakat, dan tetap menjaga harmoni sosial di daerah. (H18-53)



SM/Abdul Muiz

SUMUR MINYAK: Salah satu sumur minyak tua di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Pemkab Blora ajukan izin 4.134 sumur ke Gubernur Jateng.(53)

Title	15 Ribu Siswa Ikut Speling		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-08-14	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



Gubernur Jateng Ahmad Lutfi bersama Rektor Undip diangara ribuan mahasiswa Undip yang ikut Speling.

15 Ribu Mahasiswa Ikut Speling

Pertama di Indonesia, Speling Melesat
Ahmad Lutfi Hadir di Perguruan Tinggi

SEMARANG - Sebanyak 15 ribu mahasiswa baru Universitas Diponegoro (Undip) menjadi sasaran layanan "Speling Melesat" atau Spesialis Keliling Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.

Biasanya program Speling dilakukan di daerah yang jauh dari akses rumah sakit. Kali ini Speling Melesat hadir di kampus untuk kali pertama. Tujuannya agar layanan speling lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mahasiswa.

"Speling kita harap bisa menyasar ke kampus. Sesekali 15 ribu ma-

persisnya kesulitan di Gedung Muladi Dome, Undip, Semarang, Rabu, 13 Agustus 2025.

Speling merupakan salah satu program prioritas dalam kerja Undip sebagaimana mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Presiden Prabowo Subianto. Tercatat sampai saat ini sudah ada sekitar 5,9 juta masyarakat Jawa Tengah yang kedua-duanya memperoleh kesehatan gratis di pedesaan, dapat mendapatkan layanan kesehatan prima termasuk dari dokter-dokter spesialis.

"Kita akan mengajak mahasiswa untuk melaksanakan cek kesehatan gratis di Internet paling tinggi. Karena mendukung program pemerintah untuk cek kesehatan gratis. Saat ini sudah ada sekitar 5,9 juta masy-

arakat Jawa Tengah yang kedua-duanya memperoleh kesehatan gratis di desa-desa."

Dayan Speling dan CKG ini terbukti efektif untuk mengetahui penyakit lemah diti, meninggi koreplikasi, dan mencegah akibat yang lebih parah ketika diketahui. Oleh karena itu, Ahmad Lutfi akan selalu mengajak mahasiswa untuk meluncurkan program Speling Melesat dan meningkatkan kigian-



"Ini pertama di Undip, nanti dilanjutkan ke perguruan tinggi yang lain. Ini pertama di Indonesia. Nanti disusul seluruh perguruan tinggi."

Vunità menjelaskan, CKG sebagai untuk solusi pendukung. Maka SD, SMP, dan SMA akan dicover juga, termasuk sekolah rakyat dan perguruan tinggi. Pelayanan didekati seperti di perguruan tinggi ini untuk jenjang bola. Infrastruktur untuk menyadarkan masyarakat agar aware dengan kesehatan.

"Sekolah rakyat di sumbangan tempat dengan total 8.500 si swa. Penyakit yang banyak dituliskan tentang diri, lalu perempuan banyak yang tidak tahu omongan. Kita langsung berikan tablet tambahan diri," jelas Vunità. (jan)

AHMAD LUTFI
(Gubernur Jateng)